ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI SISTEM FORMULIR ELEKTRONIK DAN INFORMASI (SI-FELI) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DI PROVINSI GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

MARLIN H KARIM
NIM. D02420004

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI SISTEM FORMULIR ELEKTRONIK DAN INFORMASI (SI-FELI) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DI PROVINSI GORONTALO

Marlin H. Karim[1], Nuzlan Botutihe[2], Widya Kurniati Mohi[3]
[1,2,3]Program Studi Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2024
Email : marlinkarim404@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to assess the implementation of e-government through the electronic form and information system application (Si-Feli) at the Public Works and Spatial Planning Office in Gorontalo Province. The research employed a descriptive analysis using a qualitative approach. The results indicated that the implementation of e-government through the Si-Feli application had not been optimally executed, both in terms of support, capacity, and value. This was attributed to the government's insufficient efforts to socialize the application to the community, resulting in many citizens still visiting the UPTD for services. Other challenges faced in the implementation of e-government through the Si-Feli application included a lack of human resources for application management, inadequate technological infrastructure, and insufficient budget allocation for the development of the Si-Feli application.However, overall, both the government and the community have begun to perceive the benefits of implementing e-government through the Si-Feli application. Therefore, it is essential to enhance the socialization of the Si-Feli application and allocate budgets to facilitate its development.

Keywords: E-Government, Success Elements, Si-Feli

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk bagaimana penerapan *e-government* melalui aplikasi sistem formulir elektronik dan informasi (Si-Feli) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan *e-government* pada aplikasi Si-Feli belum terlaksana dengan optimal baik ditinjau dari segi *Support, Capacity* maupun *Value*. Hal ini dikarenakan pemerintah belum optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi, sehingga masih banyak masyarakat yang datang ke UPTD untuk melakukan pelayanan. Adapun kendala lain yang dihadapi dalam penerapan *e-government* pada aplikasi Si-Feli yaitu, kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini pengelola aplikasi, penyediaan infastruktur teknologi belum memadai serta kurangnya anggaran untuk pengembangan aplikasi Si-Feli. Namun secara keseluruhan baik pemerintah maupun masyarakat sudah merasakan adanya manfaat dari penerapan *e-governmnet* pada aplikasi Si-Feli. Sehingga perlu adanya sosialisasi terkait aplikasi Si-Feli, serta mengadakan anggaran untuk memfasilitas pengembangan aplikasi tersebut.

Kata Kunci: *E-government,* Elemen Sukses, Si-Feli

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan zaman berpengaruh terhadap digitalisasi di setiap bidang yang ada, tidak terkecuali pemerintahan. Didalam sektor pemerintahan, salah satu implementasi dari digitalisasi modern *adalah Elektronik Government (E-Government. Elektronik government* atau *Elekronik Governmnet* atau *e-Gov* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan sistem informasi bagi pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, (Leonita Ayu Sinta Dewi, 2014).

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, karena pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang akan diberikan kepada publik. Oleh sebab itu penyelenggaraan pelayanan publik akan terwujud apabila prinsip *Good Governance* diterapkan pada sistem pemerintahan. Yang menjadi salah satu ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah pada kualitas pelayanan. Oleh sebab itu pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah (Mohi & Botutihe, 2020).

Penerapan *e-government* di Indonesia mulai di terapkan di instansi-instansi pemerintah yaitu sejak diberlakukannya kebijakan instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, media, serta informatika). Dimana pada tahun 2001 disebutkan bahwa “instansi pemerintah diwajibkan menggunakan teknologi telematika guna mendukung *good governance* serta mempercepat adanya demokrasi. Maka dari tahun ke tahun dalam penerapan e-government di Indonesia mengalami perkembangan serta peningkatan yang sangatlah signifikan. Selain itu, dalam perkembangannya pemerintah memberlakukan Instruksi presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* sebagai gerbang pengembangan *E-government* di Indonesia. Pengembangan *E-government* diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efektif, efisien, dan akuntabilitas pada proses

pelayanan publik sehingga dapat mendorong pemerintah menjadi pelayanan publik yang berkualitas (Aprianty, 2016).

Secara umum di Indonesia mengenai realisasi pengembangan *e-government* masih terus dilakukan, tentunya dalam hal ini pemerintah masih sering menemui kendala dalam pengembangannya. Permasalahan yang sering ditemukan di Indonesia adalah penyebaran akses dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata. Berdasarkan data kementrian komunikasi dan informasi pada tahun 2015 jumlah Base Transceiser Station (BTS) pada wilyah pulau sumatra dan pulau jawa jauh lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indosesia (KOMINFO 2016). Selain itu, untuk mengakses di internet pada umumnya masih terfokus di daerah perkotaandan wilayah-wilayah aktivitas ekonomi yang baik. Kesenjangan infrastruktur seperi ini dapat mempengaruhi kesenjangan dalam memperolah suatu informasi karena sebagian besar masyarakat yang ada dipedesaan, wilayah diperbatasan negara dan kawasan timur Indonesia yang belum dapat merasakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi salah satu pemerintah daerah yang melakukan penerapan e-government dalam melaksanakan kinerjanya ialah Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Dengan adanya penerapan *e-government* menjadi inovasi terbaru sehingga dapat menjadi saluran penghubung dengan pemerintah lain maupun dengan masyarakat. Dinas PUPR Provinsi Gorontalo memanfaatkan teknologi dengan meluncurkan sebuah aplikasi yaitu Aplikasi Sistam Formulir Elektronik dan Informasi (Si-Feli) pada tahun 2019. Aplikasi Si-Feli merupakan wadah bagi pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan prosedur peminjaman alat dan prosedur pelayanan sebagai pengujian bahan material jalan, bangunan ataupun infrastruktur lainnya. Aplikasi tersebut berisi data berupa nama-nama bahan serta harga yang sudah tercantum dalam aplikasi tersebut, dalam mengakses aplikasi Si-Feli masyarakat perlu memasukan data seperti: email, nama, dan alamat sehingga masyarakat dapat memilih bahan serta harga produk yang dibutuhkan. Fungsi aplikasi Si-Feli yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan berupa peminjaman alat serta pengujian bahan material bangunan, jalan, dan

infrastruktur lainnya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pelaporan dan evaluasi proyek sosial yang telah dilaksanakan. Pengguna dapat membuat laporan kemajuan, menganalisis data hasil, serta mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan proyek. Cara menggunakan aplikasi Sistem Formulir Elektronik dan Informasi (Si-Feli) untuk pengajuan permohonan pengujian yaitu : Buka halaman login : *puprprovgorontalo.com/uptd/#popup,* ketika muncul logo “Si-Feli” silahkan di close atau klik X, pilih “Layanan” disebelah kanan atas kemudian Klik “Formulir Permohonan”, skroll kebawah kemudian klik “Download Formulir” yang berwarnah merah, cek file yang telah di download kemudian silahkan isi formulir tersebut terdahulu dan jangan lupa untuk mengganti nama file yang telah di download dengan nama jenis pengujian dan nama perusahaan : “Pengujian Tanah PT. Lembayung”. Dalam pengisian formulir silahkan mengisi “surat permohonan pengujian, KTP dan surat permohonan “ (sebagai catatan : file surat yang di isi/insert di surat permohonan di isi dalam bentuk PDF), setelah pengisian formulir sudah lengkap silahkan kembalik ke Web”Si-Feli” untuk ke tahap memasukan file formulir, silahkan pilih dan klik jenis pengujian, mengisi alamat email dan pasword anda, klik “Choose File” kemudian pilih file yang sudah diganti nama file sesuai nama yang telah diubah kemudian klik “Kirim”.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa kendala dalam penerapan *e-government* di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo. Yang pertama minimnya sosialisasi mengenai penerapan *e-governmnet* malalui aplikasi Si-Feli, sehingga masih banyak masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran akan pentingnya sistem pelayanan berbasis elektronik yang dibuktikan dengan minimnya masyarakat yang mengakses aplikasi Si-Feli, bahkan banyak masyarakat yang memberikan pernyataan bahwa mereka belum mengetahui aplikasi Si-Feli. Selain itu kendala dalam penerapan *e-government* melalui aplikasi Si-Feli ini adalah kurangnya sumber daya manusia dapat merujuk pada kurangnya keterampilan, pengetahuan, dan jumlah personal yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengelola sistem. Infrastruktur yang tidak memadai seperti belum tersebarnya infrastruktur jaringan di setiap daerah,

bahkan adapun daerah yang sudah memiliki jaringan infrastruktur akan tetapi terhambat oleh teknologi seperti komputer dan lain-lain. Serta di lihat dari segi *Value,* bahwa belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang aplikasi Si-Feli dalam rangka pengembangan *e-government* di dinas PUPR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Kepala bidang kepegaian, Kepala UPTD, Kasie Uji Material, Kepala Sub Bagian TU UPTD dan 5 masyarakat pengguna aplikasi Si-Feli. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis dari Miles, Hurberman, dan Saldana (2014).

HASIL PENELITIAN

Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor xx Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorintalo. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe, Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo Dinas Pekerjaan Umum dalah unsur adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang menpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) Kepada Daerah Provinsi Gorontalo, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimana Penerapan *E-Government* melalu aplikasi Si-Feli di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan hasil kajian dari *Hardvard JKF School of government,* dalam menerapkan konsep *e-government* pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus diperhatikan yaitu elemen *support*, elemen *capacity* dan elemen *value.* Berikut adalah uraian pembahasan dari ketiga elemen sukses dalam konsep *e-government* yaitu:

1. Support

Dalam penerapan konsep *e-government* tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya unsur *political will ini,* mustahil bagi inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model *top down,* maka jelas dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi serta dukungan dari pihak masyarakat. Adapun dukungan yang dimaksud adalah dalam bentuk kesepakatan bersama dari pihak pemerintah untuk menerapkan konsep digitalisasi dalam pelayanan publik sehingga akan terwujud sebuah pelayanan yang efektif, efisien dan trasparansi serta akuntabel. (Joko Tri Nugraha).

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan *support* atau dukungan yaitu bagaimana peran pemerintah dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo dalam mendukung penerapan *e-government* melalui aplikasi Si-Feli agar terwujudnya sebuah pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Hasil penelitian dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa indikator *Support* (dukungan) pada penerapan *e-governmnet* pada aplikasi Si-Feli di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari penerapan aplikasi e-government melalui aplikasi si Si-Feli belum sesuai yang diharapkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi tersebut sehingga masyarakat masih sering datang ke UPTD untuk melakukan pelayanan. Hal ini dikarenakan pemerintah belum optimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung tentang adanya aplikasi serta manfaat dan cara penggunaannya. Untuk penerapan *e-government* melalui aplikasi Si-Feli di dinas PUPR sudah mendapat dukungan dari pihak pemerintah dan masyarakat, dan untuk keberlanjutan penerapan *e-government* melalui aplikasi Si-Feli pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo masih terus melakukan pengembangan aplikasi tersebut.

2. Capacity

Elemen *capacity* merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *e-*

government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Dalam penelitian ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mewujudkan penerapan *e-government* yaitu adanya pengalokasian anggaran untuk penerapan *e-government,* ketersediaan infrastruktur teknologi informasi serta fasilitas pendukung lainnya, dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pengelola *e-government* yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang sesuai.

1) Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang penerapan *e-government* dalam pemerintahan, Begitu juga penerapan *e-governmnet* pada aplikasi Si-Feli di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo. Mengingat adanya konsep penerapan *e-govervnent* pada apliaksi Si-Feli bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Sehingga dalam penerapannya maka perlu dialokasikannya sumber daya terutama finansial untuk memenuhi kebutuhan standar dalam menggunakan aplikasi Si-Feli, dan juga sebagai dana pemeliharaannya.

Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa pada penerapan aplikasi Si-Feli di bidang UPTD masih kekurang dana, dikarenakan belum ada anggaran khusus untuk penerapan aplikasi Si-Feli. Hal ini dapat dilihat dari pengadaan-pengadaan fasilitas yang memiliki proses cukup lama. Mengingat penerapan aplikasi Si-Feli membutuhkan anggaran yang tinggi, maka pemerintah Dinas PUPR Provinsi Gorontalo malakukan secara bertahap untuk pengembangannya dengan memaksimalkan anggaran dan memprioritaskan yang lebih efektif dijalankan dan yang belum efektif ditunda terlebih dahulu.

2) Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi dan informasi merupakan salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah sebagai alat dan layanan atau fasilitas agar sistem berjalan dengan maksimal, karena hal ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government.*

Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa pada infrastruktur teknologi informasi pada penerapan aplikasi Si-Feli di bidang UPTD belum

cukup baik. Hal ini dapat dilihat masih kurangnya komputer serta kapasitas aplikasi yang terlalu besar sehingga menyebabkan aplikasi menjadi lemot. Dikarenakan kurangnya anggaran untuk memfasilitasi penerapan *e-goverment* pada aplikasi Si-Feli, sehingga untuk pelaksanaanya kurang optimal.

3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan *e-government.* Ketersediaan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pemerintah pengelola *e-government* yang memiliki kompetensi serta keahlian dibidang teknologi sehingga sesuai dengan konsep *e-government.*

Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam hal ini yang mengelola sistem masih menjadi salah satu kendala dalam penerapan aplikasi Si-Feli di bidang UPTD. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan, dimana jumlah yang tersedia hanya sebanyak 2 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang.

3. Value

Velue yaitu berdasarkan pada manfaat yang di dapat oleh pemerintah selaku pemberi pelayanan dan juga masyarakar sebagai penerima pelayan *e-governmen.* Dalam elemen ini yang menentukan besar tidaknya manfaat *e-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sehingga perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya.

Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa indikator *Velue* (manfaat) pada penerapan *e-government* melalui aplikasi Si-Feli sudah memberikan manfaat, baik pemerintah selaku pemberi pelayanan serta masyarakat selaku penerima pelayanann. Hal ini dapat dilihat dari yang sebelum adanya apliaksi ini masyarakat masih sering datang ke UPTD untuk melakukan pelayanan secara manual. Tetapi setelah adanya aplikasi Si-Feli ini memberi manfaat yang sangat besar kepada masyarakat, sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke UPTD untuk melakukan pelayanan. Mereka hanya perlu mengakses aplikasi tersebut dan melakukan pengisian formulir permohonan. Sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam melakukan pelayanan sehingga

menjadi efektif dan efisen. Keuntungan lain setelah adanya aplikasi ini jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan semakin meningkat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-government* melalui aplikasi Si-Feli di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan optimal. Meskipun sudah mendapat dukungan dari pemerintah akan tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum optimal dalam melakukan sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi Si-Feli, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi tersebut. Pada sisi kemampuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo masih mengalami kendala terutama ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini pengelola aplikasi, penyediaan infastruktur teknologi belum memadai serta kurangnya anggaran untuk pengembangan aplikasi Si-Feli. Namun secara keseluruhan baik pemerintah maupun masyarakat sudah merasakan adanya manfaat dari penerapan e-governmnet pada aplikasi Si-Feli. Hal ini dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi yang dirasakan oleh pegawai yang dulunya memberikan pelayanan secara manual sekarang sudah dialihkan ke aplikasi, sehingga memberikan kemudahan bagi pegawai dan masyarakat dalam melakukan proses pelayanan.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis merumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung terkait adanya aplikasi Si-Feli serta manfaat dan cara penggunaanya
2. Diharapkan kepada pemerintah dapat menambahkan sumber daya manusia yang berkompoten dalam mengelola aplikasi Si-Feli. Untuk infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya di bidang UPTD sebaiknya ditambahkan untuk memaksimalkan pelayan bagi masyarakat.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengajukan anggaran yang

lebih sehingga ketika ada pembaharuan ataupun perbaikan sarana prasarana pada penerapan *e-governmnet* pada aplikasi Si-Feli menjadi lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianty, D. R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(4), 1589-1602.

Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Indrajit, Richardus Eko. (2004) Electronic Government "Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital". Yogyakarta, Andi

Leonita Ayu Sinta Dewi, M. (2014). *Analisis Penerapan Aplikasi Surabaya Single Windows Pemerintah Kota Surabaya Menggunakan*. *3*(2).

Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014).Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3.

Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, *9*(2), 115. https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.115-124.2020

Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, *2*(1), 32-42.